

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mebel dapat dipahami sebagai peralatan rumah tangga khususnya barang-barang yang biasanya melengkapi kebutuhan rumah. Kata mebel bukanlah kata murni dari Indonesia melainkan kata serapan dari bahasa Prancis “furniture”. Biasanya mebel merujuk pada barang-barang besar dari kayu, plastik, logam, kaca bahkan bahan-bahan tekstil yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan rumah. Permebelan di Kabupaten Jepara sudah menjadi identitas daerah yang dikenali oleh masyarakat Indonesia. Kabupaten Jepara menjadi daerah produsen dan pemasok barang mebel yang besar dengan ciri khas ukirannya yang menyentuh nilai ekspor hingga 302,7 Juta Dolar AS (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2024). Mebel dengan ciri khas ukiran kayu menjadi sumber pendapatan utama dalam perekonomian masyarakat Jepara. Masyarakat Jepara rata-rata memiliki industri mebel, kios, ataupun bengkel mebel yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jepara (Kristiana, 2017). Data BPS Kabupaten Jepara tahun 2019 menunjukkan terdapat 3.945 unit industri mebel. BPS Kab. Jepara, 2019 industri mebel memiliki jumlah yang paling banyak diantara unit industri lainnya sebagaimana pada tabel 1. 1. Data Industri berdasarkan Jenisnya Tahun 2019. Sumber: BPS Kab. Jepara 2019 industri mebel memiliki jumlah yang paling banyak diantara unit industri lainnya sebagaimana pada tabel berikut

Kecamatan	Potensi														Jumlah/ Total
	Mebel	Kerajinan o Kayu	Kerajinan o Rotan	Konveksi	Temun	Baruk	Makanan	Minuman	Rebok	Kerajinan o	Manul	Genteng	Gorabah		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1. Kedung	113	-	-	9	-	-	36	-	-	-	-	-	-	158	
2. Pecangaan	269	33	12	56	631	2	415	2	-	6	51	-	7	1.484	
3. Kalinyamatan	10	3	3	478	-	-	205	-	19	5	157	-	162	1.042	
4. Welahan	4	8	11	18	-	-	49	20	-	-	2	-	25	137	
5. Mayong	-	-	-	13	-	-	32	-	-	-	-	40	9	94	
6. Nalumsari	54	-	-	29	-	-	12	-	-	-	-	-	33	128	
7. Batealit	34	5	-	19	-	5	71	-	-	-	-	-	-	134	
8. Tahunan	2.938	48	12	6	-	-	23	-	-	-	-	-	-	3.027	
9. Jepara	405	202	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	740	
10. Mlonggo	118	21	-	3	-	-	43	-	-	-	-	-	-	185	
11. Pakis Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
12. Bangori	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110	
13. Kembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
14. Kelling	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	
15. Donorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
16. Karimunjawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Jumlah	3.945	320	38	631	631	7	1.141	22	19	11	210	40	236	7.251	

Tabel 1. 2. Data Industri berdasarkan Jenisnya Tahun 2019

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2019

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah industri terbanyak adalah industry Mebel, disusul dengan industry makanan, kemudian kerajinan kayu dan industri batik di peringkat terakhir, atau dapat dikatakan bahwa 54% Industri di Kabupaten Jepara adalah Industri Mebel.

Keberadaan seni Ukir di Jepara sudah ada sejak masa Pemerintahan Ratu Kalinyamat pada tahun 1521 – 1546. Pada masa tersebut, seorang Patih dari Ratu Kalinyamat dengan sukarela mengajarkan keterampilan ini pada Masyarakat di sekitar Kerajaan. Keberadaan seni ukir tersebut terus berkembang dan semakin berkembang ketika kemunculan pendatang dari Cina yang mulai meramaikan proses pemasaran seni ukir Jepara (Oktavianus, 2015). Industri mebel di Jepara terus berkembang hingga dikenal di berbagai daerah bahkan di mancanegara, hingga mendapat julukan sebagai “Jepara Kota Ukir” dan *The World Carving Center* yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi perekonomian daerah (Adila, 2020). Sebesar 34,87% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara berasal dari Sektor Mebel (Furnitur) atau terbesar dari sumbangan PDRB sektor lainnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara (jutaan rupiah), 2014–2021

Lapangan Usaha Industry	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A Pertanian, Kehutanan, dan	3 102 604.51	3 394 047.62	3 539 460.10	3 608 795.03	3 805 518.69	3 949 098.78	4 170 117.08	4 182 046.63
B Pertambangan dan Penggalian	367 828.48	429 146.69	468 784.23	508 531.59	544 806.43	576 735.22	589 505.77	605 517.60
C Industri Pengolahan	6 839 237.63	7 594 052.58	8 265 133.69	8 912 818.77	9 744 273.71	10 471 297.22	10 517 533.93	11 252 605.07
D Pengadaan Listrik dan Gas	17 848.77	18 587.69	21 845.54	25 483.09	28 093.48	31 279.64	31 855.59	34 310.04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	13 260.15	13 983.22	14 597.72	15 664.16	16 490.44	17 535.30	19 091.53	19 738.03
F Konstruksi	1 326 567.10	1 471 459.45	1 597 389.32	1 759 082.19	1 948 282.74	2 176 428.92	2 151 164.42	2 425 860.87
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	3 394 676.19	3 691 321.64	3 995 410.22	4 334 934.02	4 681 152.10	5 066 090.21	4 889 168.46	5 314 687.55
H Transportasi dan Pergudangan	743 001.76	819 917.10	878 784.26	955 700.44	1 030 469.65	1 141 010.97	841 287.04	874 369.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	767 076.39	870 640.38	971 268.55	1 049 503.70	1 148 311.65	1 283 545.45	1 205 815.65	1 264 126.84
J Informasi dan Komunikasi	462 711.31	512 510.83	555 880.94	663 711.83	756 743.79	853 538.17	1 073 876.29	1 248 786.18
K Jasa Keuangan dan Asuransi	424 604.22	465 943.73	523 964.79	575 840.27	616 595.92	647 719.27	680 337.97	733 116.65
L Real Estate	308 212.58	337 697.33	366 584.51	397 146.53	428 930.45	468 323.70	470 703.37	490 074.29
M,N Jasa Perusahaan	87 644.26	100 710.88	115 668.70	131 206.97	147 560.52	171 849.67	163 788.24	177 528.08
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	506 085.17	549 364.96	593 189.40	624 080.27	650 170.62	677 617.39	673 523.62	668 999.33
P Jasa Pendidikan	1 089 288.13	1 161 119.79	1 289 850.27	1 400 937.41	1 549 571.47	1 710 822.39	1 712 109.12	1 733 728.63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan	185 502.30	207 850.97	230 536.39	254 135.00	280 378.66	306 155.28	312 298.41	325 401.27
R,S, T,U Jasa lainnya	431 145.06	457 993.39	521 468.08	567 806.21	619 557.17	681 149.03	672 994.05	694 802.19
	20 067 294.01	22 096 348.25	23 949 816.71	25 785 377.48	27 996 907.49	30 230 196.61	30 175 170.54	32 045 698.36
Produk Domestik Regional Bruto	20 067 294.01	22 096 348.25	23 949 816.71	25 785 377.48	27 996 907.49	30 230 196.61	30 175 170.54	32 045 698.36
<i>Gross Regional Domestic Bruto</i>								

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 17 jenis lapangan usaha di Kabupaten Jepara, masing-masing usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi Kabupaten Jepara. Lapangan usaha yang paling banyak menghasilkan PDRB adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang di dalamnya terdapat industri mebel dan kerajinan tangan disusul dengan lapangan usaha pertanian kehutanan, dan Perkebunan, dan diakhiri dengan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang dengan sumbangan terkecil sebesar 0,06%.

Industri pengolahan didefinisikan sebagai jenis industri yang di dalamnya terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah bahan-bahan atau sumber daya yang ada menjadi barang jadi atau barang setengah jadi ataupun barang yang nilainya kurang menjadi barang bernilai tinggi (BPS Kab. Jepara, 2019). Lebih lanjut, industri pengolahan dijelaskan terdiri dari :

1. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
2. Industri Karet;
3. Industri Barang Galian bukan Logam;
4. Industri Barang dan Logam, serta Peralatan Listrik;
5. Industri Permesinan;
6. Industri Peralatan Angkutan;
7. Industri Furniture;
8. Dan industri pengolahan lainnya.

Industri furniture atau yang dikenal sebagai industri mebel di Kabupaten memiliki peminat yang cukup tinggi dari segi ketenagakerjaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4. Penduduk Kabupaten Jepara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Usaha (Jiwa) Tahun 2020 - 2021

Lapangan Usaha	Penduduk Kabupaten Jepara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Usaha Agustus (Jiwa)	
	2020	2021

Pertanian	89,423	72,235
Manufaktur	334,486	373,416
Jasa	210,477	212,557
Jumlah	634,386	658,208

Sumber: jeparakab.bps.go.id, 2021

Berdasarkan tabel 1.3, Penduduk Kabupaten Jepara yang memiliki umur 15 tahun ke atas memiliki kecenderungan bergabung dalam lapangan usaha manufaktur yang dalam hal ini cenderung mengarah pada industri mebel dengan persentase sebesar 57% dari keseluruhan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan memiliki lapangan usaha pada tahun 2021.

Pendapatan dan minat ketenagakerjaan yang tinggi dari Industri mebel seringkali membuat Industri mebel di ibaratkan sebagai tulang punggung perekonomian daerah Kabupaten Jepara. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menerbitkan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan keberadaan industri mebel secara mandiri dan *continue*;
2. Meningkatkan kapasitas industri mebel agar industri mebel mampu menjalankan usaha dan mendapatkan keuntungan secara optimal;
3. Mengembangkan dan memajukan kemampuan usaha industri mebel agar memiliki daya saing tinggi;
4. Mengoptimalkan potensi usaha industri mebel untuk meningkatkan perkembangan kegiatan dan skala usaha.

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk memberdayakan subyek pemberdayaan dalam hal ini adalah pelaku usaha mebel, sehingga diharapkan dapat membentuk pelaku usaha untuk mengembangkan ide dan sistem kerja sehingga berdampak pada peningkatan standar kualitas mebel, penguatan Lembaga

pelaku usaha mebel serta menumbuhkan semangat memperkuat usaha agar dapat memiliki daya saing yang tinggi secara mandiri. Dalam pemberdayaan industri mebel diselenggarakan dalam bentuk:

1. Pendidikan dan pelatihan industri mebel.
2. Penyuluhan dan pendampingan industri mebel.
3. Standar kualitas mebel.
4. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel.
5. Pola kemitraan industri mebel.
6. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan industri mebel.
7. Kemudahan mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
8. Penguatan kelembagaan pelaku usaha industri mebel.

Dalam pembinaan pemerintah daerah wajib membina pelaku usaha industri mebel perorangan, kelompok, dan / atau koperasi dalam menghasilkan sendiri sarana produksi mebel yang memiliki kualitas tinggi. Pembinaan terhadap pelaku usaha mebel diselenggarakan melalui:

1. Bimbingan bagi pelaku usaha mebel sesuai kebutuhan
2. Pengembangan melalui pelaksanaan diklat, sosialisasi dan penelitian tentang usaha mebel
3. Fasilitasi pengembangan *networking* usaha mebel serta kerjasama pihak yang terlibat;
4. Fasilitasi konsultasi dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi pelaku usaha mebel.

Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan perlindungan dalam rangka menjaga serta melindungi keberadaan usaha mebel dari potensi-potensi keberadaan hal yang menghambat dan mengancam perkembangan industri mebel di Kabupaten Jepara melalui:

1. Pembangunan fasilitas pendukung industri mebel.
2. Memberikan jaminan kepastian dalam berusaha.

3. Pemantauan dan *controlling* terhadap penetapan standar harga produk mebel.
4. Memastikan persaingan sehat dalam dunia industri mebel.
5. Penyediaan fasilitas bantuan hukum bagi yang membutuhkan.
6. Pemberian asuransi bagi para pelaku usaha dalam industri mebel.

Perlindungan industri mebel dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan industri mebel dengan mengikutsertakan sebagai elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel selanjutnya diimplementasikan dalam beberapa program berikut:

1. Program penyediaan bahan baku (kegiatan budidaya Jati Unggul Nusantara, Gerakan Rehabilitasi Hutan, serta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
2. Program fasilitasi permodalan bagi pengusaha mebel (berupa bantuan modal, hibah, dan bantuan sarana prasarana)
3. Program Fasilitasi pemasaran melalui kegiatan pameran, fasilitasi hak paten dan pembuatan branding daerah;
4. Program peningkatan keterampilan dalam berbagai Pendidikan dan pelatihan salah satunya adalah melalui Balai Pelatihan Kerja dan jurusan seni dalam Pendidikan formal Tingkat SMK
5. Program fasilitasi infrastruktur pendukung baik penguatan jalan sebagai akses pemasaran, penguatan sentra industri dan desa wisata.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengeluarkan kebijakan terkait Perlindungan dan membuat sejumlah program, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel, keberlangsungan industri mebel di Kabupaten Jepara masih menemui beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu:

1. Permasalahan yang paling umum dialami oleh para pelaku usaha mebel adalah ketersediaan modal yang menjadi salah satu sumber daya dalam proses produksi (Diva Molanda, 2023), permasalahan ini menjadi serius disaat pelaku usaha mebel mulai kehabisan modal dalam melakukan produksi sehingga tidak dapat membiayai kegiatan operasional produksi mebel yang mengakibatkan usaha tersebut harus gulung tikar, contohnya pada saat covid 2020 dimana kebijakan ekspor impor sangat dibatasi bahkan segala kegiatan mengalami pembatasan yang cukup ketat sehingga menghambat keberlangsungan usaha mebel. Selain itu, bantuan modal dari pemerintah cenderung mengalami kemandegan dimana bantuan modal tersebut seringkali tidak kembali dan tidak dapat diputar lagi bagi pengusaha mebel selanjutnya sehingga pemerintah menghentikan program tersebut untuk sementara.
2. Selain terkait permodalan, permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan mulai menjamurnya pabrik garmen di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Jepara, dengan upah minimum kabupaten/kota sebesar 2,1 juta perbulan para pengrajin mebel lebih memilih untuk pindah Haluan menjadi pekerja pabrik garmen dengan alasan kenyamanan serta kestabilan gaji (Yasmine, 2021). Pemberian izin pendirian pabrik garmen oleh Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi bumerang tersendiri bagi Kabupaten Jepara, disatu sisi investasi meningkat namun diisi lain, keberlangsungan usaha-usaha mebel kecil dan eksistensi pengusaha lokal mulai terancam mengingat resiko keselamatan yang lebih tinggi dalam sektor usaha mebel dibandingkan dengan sektor garmen.
3. Permasalahan selanjutnya yang cukup mengancam keberlangsungan usaha mebel di Kabupaten Jepara adalah krisis regenerasi pengukir mebel, menurut Malik dalam penelitiannya yang berjudul Krisi Pengukir Muda dan Perkembangan Seni Ukir di Desa Bawu Kabupaten Jepara (Malik Fatahillah, 2023), krisis tersebut terjadi karena beberapa hal yaitu:
 - a. Proses sosialisasi dari generasi sebelumnya ke generasi penerus yang tidak sempurna;

- b. Pendapatan seorang pengrajin ukir yang dinilai terlalu minim;
- c. Pilihan alternatif pekerjaan yang cukup bervariasi dan lebih menjanjikan saat ini;
- d. Program pemerintah yang dinilai masih belum tepat sasaran.

Berkaca dari sejarah perkembangan seni ukir dalam usaha mebel di Kabupaten Jepara yang dilakukan secara turun menurun, krisis regenerasi ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan usaha mebel, Pemerintah Kabupaten Jepara masih belum maksimal karena belum mampu menumbuhkan minat yang tinggi pada generasi muda dalam melanjutkan usaha mebel seni ukir.

Dari beberapa permasalahan dalam proses implementasi program-program tersebut, permasalahan yang cukup mengkhawatirkan adalah krisis regenerasi pengusaha mebel ukir. Sebagian orang tua di Kabupaten Jepara yang berprofesi sebagai pengukir atau bekerja dalam bidang seni ukir memiliki kecenderungan untuk melatih mengukir pada anak mereka, namun karena tidak adanya minat dari dalam diri pemuda saat ini pada akhirnya membuat para orang tua membebaskan anaknya dalam memilih pekerjaan sesuai minat masing-masing dan beberapa orang tua sudah mulai beralih profesi (Malik Fatahillah, 2023). Kemudian berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengatasi krisis regenerasi tersebut adalah dengan Pendidikan dan pelatihan seni ukir. Pelayanan Pendidikan dan kepemudaan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 telah dimasukkan kedalam permasalahan pokok yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Jepara untuk kurun waktu 2023 – 2026. Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan program Pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha mebel dalam bentuk:

- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

- b. Pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel untuk mendapatkan Pendidikan dibidang permebelan, dan atau
- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel

Berkaitan dengan pengembangan Pendidikan dibidang permebelan salah satu strateginya adalah dengan pengembangan kurikulum berbasis *skill*, *knowledge*, *attitude* dan *learning culture* serta penguatan Pendidikan kejuruan dan vokasi dengan program pengembangan kurikulum. Namun, akhir-akhir ini fokus Pemerintah Kabupaten Jepara berada pada proses pemerataan sarana-prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan sehingga perihal perkembangan kurikulum khususnya kurikulum seni ukir menjadi terkesampingkan. Hal tersebut juga diperparah dengan keberadaan sekolah dan jurusan ukir atau sekolah khusus ukir yang mulai jarang ditemui di Jepara (Rokhis Saidah, 2017). Kondisi tersebut tentu saja bertentangan dengan keberadaan program Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu Program Peningkatan Keterampilan dalam berbagai Pendidikan dan Pelatihan. Lebih lanjut, keberadaan sekolah khusus ukir yang dulunya dikenal dengan nama “*Openbare Ambachtsschool*” saat ini sudah berganti menjadi SMKN 2 Jepara yang menghilangkan esensi dan tujuan awal dari pendirian sekolah tersebut dan pada perkembangnya berimbas pada menghilangnya jurusan seni ukir sehingga sekolah tersebut tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah kejuruan lainnya, selain itu seni ukir yang hanya menjadi muatan lokal seni ukir di sekolah non kejuruan tidak berjalan sesuai harapan dan jumlah guru seni ukir pun terbatas serta Sebagian merangkap menjadi guru seni rupa (Yusron Al-Mufti et al., 2023). Kondisi ini tentu saja semakin mengancam keberlangsungan industri mebel seni ukir di Kabupaten Jepara, karena jumlah pengrajin mebel seni ukir dapat semakin menurun dengan tidak adanya regenerasi penerus.

Berdasarkan uraian kondisi keberadaan industri furniture (usaha mebel) khususnya mebel seni ukir di Kabupaten Jepara yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun

2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel Program Peningkatan Keterampilan dalam berbagai Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jepara. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat Kabupaten Jepara yang telah dijuluki kota ukir dan Sebagian besar Masyarakat bergantung pada usaha mebel ukir untuk mengetahui lebih lanjut kondisi implementasi peraturan tersebut dan permasalahan dalam proses implementasinya.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel Kabupaten Jepara dalam Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jepara?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan mampu membawa kontribusi positif untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan khususnya dibidang Administrasi Publik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik kedepan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Judul	Fokus Kajian	Metode	Hasil Penelitian
Alfa Beatin Nurul Ilmy/ Penerapan Metode Job Safety Analisis di Proses Produksi Mebel PT. Paradise Island Furniture Terhadap Bahaya Kecelakaan/ 2020	Tujuan penelitian ini untuk meminimalisir bahaya kecelakaan kerja di bagian produksi mebel PT. Paradise Island Furniture dengan menerapkan metode job Safety Analilys	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif observasi serta pendekatan case control dengan menggunakan 119 orang yang bekerja di PT. Paradise Island Furniture yang ditentukan secara random sebagai sampel penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko kecelakaan kerja di industri mebel memiliki Tingkat resiko yang lumayan tinggi dan seharusnya dapat diminimalisir apabila program kerja K3 dapat diterapkan dengan baik
Arfan Bakhtiar, Diana Puspitasari dan Arief Rachman/ Factor Pendorong Industry Kecil DannMeegah Mebel di Jepara/ 2019	Tujuan penelitian ini untuk memngkaji faktor yang mendorong pemilik Industri Kecil Mebel di Jepara untuk menerapkan standar.	Kuesioner sebanyak 120 buah distribusi ke industri kecil mebel yang ada di Jepara	Berdasarkan analisis data yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa ada tujuh elemen yang mendorong usaha kecil untuk mengadopsi standar, antara lain: faktor internal perusahaan, faktor fasilitas dan infrastruktur, kebutuhan perusahaan, budaya dan keuangan perusahaan, atribut

			tenaga kerja, serta faktor pesaing. Temuan penelitian ini berguna bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi pemilik usaha dan pemerintah
Fitri Ella Fauziah, Bening Krisyassari, dan Sri Mulyani/ Pengaruh Lesunya Industri Mebel Terhadap Keluarga Pengusaha Mebel Wanita Jepara/ 2020	Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh lesunya industry mebel terhadap keluarga pengusaha mebel wanita di Jepara, yang terkait pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, hubungan antar keluarga, dan lain-lain	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang ditentukan melalui metode snowball sampling yang berkisar pada pengrajin, pemilik, pengrajin dan distributor	Hasil penelitian wanita dapat mempertahankan usahanya dalam krisis mebel tergantung dari ukuran perusahaan
Meily Murdiyani/ Peran Pemerintah kabupaten Jepara Dalam Rangka Fasilitas Terhadap Industri Mebel Dalam Perdagangan Bebas (Studi Kasus Berlangsungnya ACFTA)/ 2019	Tujuan penelitian adalah mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jeparandalam memfasilitasi penegusaha mebel dengan perjanjian ACTA, mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusaha bebel Jepara	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga penggalan data didapatkandari subjek penelitian melauai wawancara yang mendalam.	Hasil penelitian memperlihatkan peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha membel di Jepara setelah adanya perjanjian ACFTA dilakukan melalui regulasi dan kelembagaan.

1.5.2. Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang berkaitan dengan sistem manajemen pemerintahan yang didalamnya mencakup kebijakan sampai dengan pelayanan masyarakat atau publik. Administrasi Publik juga berkaitan erat dengan trias politika sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Oleh karena itu keberadaan administrasi publik tidak lepas dari studi kenegaraan.

Marx (dalam Pasolong, 2012) mengartikan administrasi publik sebagai sebuah tindakan yang diputuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan dilakukan secara penuh. Keputusan tersebut dilakukan secara sadar dan sistematis dengan menggunakan sumber daya yang telah diperhitungkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau seseorang dalam sebuah pemerintahan.

Kemudian, L.D. White (dalam Keban, Yeremias, 2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai kegiatan operasional dalam sebuah negara dengan tujuan untuk menjalankan kebijakan publik yang telah disusun. Disisi lain menurut Woodrow Wilson, administrasi publik dipahami sebagai implementasi hukum yang rinci dan sistematis. Atau dalam hal ini administrasi publik bisa dipahami sebagai serangkaian kebijakan, praktek, hingga evaluasi dalam sebuah negara.

1.5.3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan seringkali diidentikan dengan peraturan yang mengikat dan publik merupakan subjek dari peraturan tersebut. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan publik dan bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok (Rusli, 2013). Meskipun sebagai alat (tool), keberadaan Kebijakan merupakan sebuah hal yang penting, karena sangat berpengaruh pada ketercapaian sebuah

tujuan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan namun keberadaan kebijakan tidak serta merta mampu menghasilkan kondisi yang selaras dengan harapan dari pembuatan kebijakan tersebut. Budi Winarno menjelaskan bahwa dalam kebijakan publik memiliki beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda : tahap pembuatan agenda kebijakan yang di dalamnya terdapat permasalahan yang akan dirumuskan solusinya menjadi sebuah kebijakan sesuai dengan prioritas dari hasil pembahasan, bisa saja permasalahan yang ada tidak akan dibahas sama sekali atau sebaliknya.
2. Formulasi kebijakan : tahap pendefinisian permasalahan yang telah disepakati dan proses pemecahan masalah dengan membandingkan berbagai pilihan dan alternatif kebijakan yang ada sebagai Solusi pemecahan permasalahan terbaik.
3. Adopsi Kebijakan : tahap alternatif kebijakan diadopsi berdasarkan hasil dukungan mayoritas.
4. Implementasi Kebijakan: Tahap pelaksanaan kebijakan yang di dalamnya terdapat proses mobilisasi sumber daya finansial dan manusia dengan dukungan unit administrasi. Tahap ini dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di lapangan.
5. Evaluasi Kebijakan : tahap penilaian hasil pelaksanaan kebijakan atau tahap evaluasi untuk melihat seberapa jauh dampaknya terhadap pemecahan masalah yang dihadapi dengan ukuran dan kriteria tertentu.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan peraturan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi (dalam Winarno, 2012) Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan atau aktivitas dalam keputusan yang telah dibuat sebelumnya yang mencakup langkah-langkah dalam upaya merealisasikan keputusan yang telah dibuat tersebut menjadi sebuah kegiatan atau tindakan operasional

dengan jangka waktu khusus atau dalam rangka melanjutkan langkah-langkah sebelumnya dalam rangka menciptakan sebuah perubahan. Perubahan-perubahan tersebut ditujukan untuk kepentingan organisasi publik yang berorientasi pada masyarakat dengan segala tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Daniel. A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Solichin, 2008, p. 65), Menjelaskan bahwa Implementasi adalah kegiatan pemahaman terkait apa yang telah terlaksana setelah kebijakan atau program ditetapkan dan di berlakukan atau telah selesai dirumuskan, fokus dari implementasi sendiri ada pada aktivitas yang muncul atau timbul setelah disahkannya peraturan negara baik dari segi administrasi sampai dengan dampak yang timbul pada masyarakat.

Dari penjelasan-penjelasan di atas Secara garis besar, Implementasi Kebijakan ada setelah sebuah peraturan atau keputusan ditetapkan dan berfokus pada langkah atau upaya untuk mendukung keterwujudan keputusan atau peraturan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas dalam pelaksanaan keputusan atau sebuah kebijakan yang didalamnya melibatkan banyak hal termasuk berbagai macam sumber daya dengan harapan untuk mencapai tujuan organisasi.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ripley dan Franklin (Ripley, 1986) menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan sejatinya dapat dilihat dari 3 aspek yaitu bagaimana kepatuhan dari setiap pihak terhadap birokrasi yang berjalan baik terhadap birokrasi tingkat tinggi maupun tingkatan birokrasi lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ada tidaknya rutinitas yang berjalan dan bagaimana Tingkat kelancaran nya serta masalah yang ada di

dalamnya, kemudian penyelenggaraan serta dampak yang diharapkan apakah sesuai dengan program yang terarah.

Sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil dengan melihat berbagai macam variable didalamnya yang cukup kompleks. Variabel-variabel tersebut biasanya saling terhubung satu sama lain dalam berbagai model implementasi kebijakan yang ada. Model implementasi tersebut di-antaranya adalah sebagai berikut (Mubarok et al., 2020):

1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III melihat keberhasilan implementasi kebijakan melalui 4 variabel yaitu:

- a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan 2 hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi. Mekanisme dalam struktur birokrasi berkaitan dengan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai *guideline* program kebijakan. Keberadaan SOP dapat digunakan oleh aktor kebijakan agar penggunaan sumber daya dan waktu yang dimiliki dapat di optimal kan. Selain itu, keberadaan SOP juga dapat memberikan keseragaman langkah dalam sebuah organisasi terutama pada sebuah organisasi yang kompleks dan luas, sehingga tercipta sebuah fleksibilitas dan kesamaan dalam proses penerapan kebijakan dan dapat memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, keberadaan SOP juga dapat menghambat implementasi Kebijakan bagi implementasi yang membutuhkan cara-cara kerja baru. Struktur organisasi dalam struktur birokrasi berkaitan dengan pelaksana yang sejauh mungkin menghindari hal-hal yang berbelit, Panjang, dan kompleks.

- b. Sumber Daya

Penyelenggaraan sebuah kebijakan dapat berjalan dengan adanya dukungan sumber daya. Sumber daya berkaitan erat dengan apa yang dimiliki baik dari segi materi atau tenaga kerja yang dapat membantu pelaksanaan setiap kegiatan. Sumber daya yang berkaitan dengan tenaga kerja atau manusia yang dimiliki sebuah organisasi adalah kondisi di mana jumlah dan kualitas orang yang terlibat dalam implementasi memadai dan dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya materi berkaitan dengan keberadaan anggaran atau pun modal atas sebuah kebijakan atau program. Sumber daya – sumber daya tersebut perlu diperhatikan dalam rangka kelancaran implementasi kebijakan.

c. Komunikasi

Sebuah pelaksanaan kebijakan akan dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat pola komunikasi yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya. Komunikasi tersebut harus terjalin antara implementor dengan kelompok sasaran agar kelompok sasaran dapat memahami tujuan dari keberadaan pelaksanaan kebijakan tersebut dan tujuan bersama dapat terwujud dengan optimal. Sedangkan dari segi implementor, agar komunikasi dapat terjalin dengan baik kebijakan dapat di komunikasi kan melalui sosialisasi untuk menghindari miskomunikasi atau distorsi informasi terkait kebijakan yang ditetapkan.

d. Disposisi

Kebijakan biasanya menunjukkan karakter dari sebuah organisasi dan tujuannya. Karakteristik juga akan menempel pada pihak implementor dari kebijakan tersebut. Karakter utama yang seharusnya dimiliki oleh implementor adalah karakter yang integritas (jujur, berkomitmen, dan demokratis). Selain itu, di posisi atau kecenderungan yang ada dalam sebuah karakteristik

juga menjadi faktor yang memunculkan konsekuensi penting dalam proses implementasi.

2. Model Implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondenelli
Menurut Cheema, terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Standar Kebijakan

Standar kebijakan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan. Standar ini harus jelas dan dapat diukur secara pasti agar tidak menimbulkan permasalahan. Pelaksanaan kebijakan sejatinya bisa saja berhasil atau pun gagal apabila implementor tidak sadar akan pentingnya keberadaan standar dalam pencapaian tujuan, karena standar dan tujuan saling berkaitan dan berhubungan erat dengan implementor.

- 2) Sumber daya

Pelaksanaan implementasi dapat dikatakan berhasil apabila dari segi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat di maksimalkan sebaik mungkin. Dalam aspek sumber daya, manusia adalah sumber daya paling penting yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Setiap tahap atau langkah pelaksanaan kebijakan menuntut implementor yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan. Sumber daya yang tak kalah penting adalah sumber daya materi dalam hal ini adalah anggaran serta

waktu yang perlu diperhitungkan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal tersebut menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan lebih seksama karena sebuah pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh para implementor baik dari ciri sampai dengan keterlibatannya. Ciri dan keterlibatan tersebut berkaitan dengan proses penyelenggaraan kebijakan yang seringkali menuntut adanya kriteria-kriteria khusus contohnya implementor yang disiplin dan tegas agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, implementor biasanya harus memiliki sikap demokratis dan persuasif untuk pendekatan dengan kelompok sasaran mengingat cakupan wilayah yang luas dan jumlah kelompok sasaran dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali.

4) Sikap para pelaksana

Pelaksanaan kebijakan dimulai dari proses penyaringan persepsi dari implementor terkait batas-batas penerapan dari kebijakan itu sendiri. Respon dari proses penyaringan tersebut nantinya akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Adapun ketiga respon tersebut adalah pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan ini dilihat, dipahami, dan dialami. Kemudian bagaimana arah respon dari kelompok sasaran apakah terdapat penerimaan, netral atau penolakan. Ketiga adalah respon terkait intensitas disposisi, apabila intensitas disposisi

tidak seperti yang diharapkan atau kurang maka dapat menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan.

5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, maka pemahaman terkait kebijakan menjadi sebuah hal yang penting. Oleh karena itu tanggung jawab terkait pencapaian standar dan tujuan menjadi sangat besar dan sudah seharusnya dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi menjadi standar awal dalam proses pelaksanaan oleh para implementor. Karena informasi yang disampaikan terkait standar dan tujuan kebijakan harus seragam dan konsisten dari awal. Kondisi ini akan menjadi peluang terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Karena pelaksanaan kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh komunikasi implementors yang harus berjalan secara konsisten dan akurat. Koordinasi dapat menjadi salah satu pilihan metode dalam proses komunikasi pelaksanaan kebijakan, karena koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat akan menurunkan tingkat persentase kesalahan dan meningkatkan persentase keberhasilan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kinerja pelaksanaan kebijakan juga dapat dilihat dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan tersebut. Lingkungan eksternal tersebut biasanya terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan politik, dan lingkungan ekonomi. Apabila lingkungan-lingkungan eksternal tersebut tidak kondusif maka hal ini akan menghambat dan dapat menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sehingga diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakn.

1.5.5. Pemberdayaan, Perlindungan Dan Pembinaan Mebel

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan industri mebel dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel, meningkatkan standar kualitas industri mebel serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan para pelaku usaha mebel kecil dan menengah agar mampu mandiri berdaya saing tinggi.

b. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaku atau tenaga kerja mebel dilakukan dalam bentuk

1. Membimbing pelaku dengan kepentingan pelaku usaha.
2. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, usaha mebel yang sesuai 13 pelatihan, penyuluhan, dan penelitian permebelan; yang saling menguntungkan antar pelaku usaha mebel;
3. Membantu mengembangkan jaringan usaha mebel dan kerjasama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.
4. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

1.6. Fenomena Penelitian

1.6.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

Fenomena penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara menitikberatkan pada upaya pemberdayaan industri mebel melalui pelaksanaan Program

Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan Seni Ukir. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis implementasi peraturan tersebut pada program di maksud dengan melihat beberapa hal berikut:

1. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
2. Pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel untuk mendapatkan Pendidikan di bidang pembelaan, dan atau
3. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang industri mebel.

Kemudian, dalam menganalisis pelaksanaan program-program tersebut, penulis juga memperdalam analisis terkait penurunan minat terhadap mebel seni ukir selama proses pelaksanaan program kegiatan tersebut.

1.6.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

Dalam penelitian ini, untuk menganalisa faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara menitikberatkan pada upaya pemberdayaan industri mebel melalui pelaksanaan Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan Seni Ukir, peneliti menggunakan teori Kebijakan George C. Edward III dan teori kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn. Kedua teori tersebut memiliki kesamaan dalam melihat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yang menyoroti kejelasan dari kebijakan tersebut, sumber daya yang dimiliki untuk mendukung implementasi, kondisi organisasi pelaksana, sikap para pelaksana implementasi kebijakan, dan komunikasi yang terjalin. Teori- teori tersebut sangat sesuai dengan penelitian milik peneliti yang akan berfokus dalam

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari sisi stakeholder terkait, kemudian untuk melengkapi analisis implementasi dari segi masyarakat dengan fenomena minat generasi muda terhadap usaha mebel seni ukir yang semakin menurun di tengah upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara menitikberatkan pada upaya pemberdayaan industri mebel melalui pelaksanaan Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan Seni Ukir yang dilaksanakan pemerintah, peneliti menggunakan teori milik van meter dan Van Horn yang saling melengkapi dengan teori milik Edward III dalam hal menganalisis faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dalam hal ini akan di fokuskan pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Fokus penelitian terhadap fenomena yang ada dengan teori yang dipilih adalah sebagai berikut:

a. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan sistem birokrasi, diperlukan adanya SOP atau alur yang jelas dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terutama dalam proses pelaksanaan program serta siapa saja yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini, Peneliti melihat bagaimana kejelasan SOP dalam pelaksanaan kebijakan program peningkatan keterampilan dalam berbagai Pendidikan dan pelatihan bagi para pengusaha mebel, apakah sudah tersedia dan dapat diakses oleh para pengusaha mebel seni ukir.

b. Sumberdaya

Sumberdaya dapat berkaitan dengan sumberdaya manusia, finansial dan sarana prasarana. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana ketersediaan anggaran dan proses pengelolaannya oleh stakeholder terkait untuk menyelenggarakan

kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para pengusaha mebel seni ukir.

c. Komunikasi

Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila terjalin komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Dalam penelitian ini melihat bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah kabupaten Jepara dan para pengusaha mebel serta Lembaga terkait serta komunikasi yang terjalin dengan generasi muda selaku generasi yang akan meneruskan mebel seni ukir Jepara itu sendiri.

d. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan karakteristik implementor kebijakan, dalam penelitian ini, peneliti akan melihat sejauh mana sikap dan komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjaga dan mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel khususnya dalam menjangkau para pengusaha mebel seni ukir dan calon pengusaha mebel seni ukir.

e. Lingkungan sosial dan ekonomi

Lingkungan sosial dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang patut dipertimbangkan dalam menilai keberhasilan sebuah kinerja implementasi kebijakan, karena lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, perlu dilakukan analisis terhadap penurunan minat generasi muda pada usaha mebel seni ukir ditengah proses implementasi program-program yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, peneliti menggunakan variable lingkungan ini untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sikap dari masyarakat yang menimbulkan respon terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan

Industri Mebel di Kabupaten Jepara yang berfokus Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan.

Perbandingan atau perbedaan antara kedua teori tersebut adalah

1. Fokus: Edward III lebih focus pada factor-faktor internal birokrasi, sedangkan Van meter dan Van Horn lebih menekankan pentingnya factor-faktor eksternal seperti kondisi social ekonomi.
2. Variabel: Van Meter dan an Horn mengidentifikasi lebih lebih banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan public.
3. Keterlibatan Aktor: Kedua teori menekankan pentingnya keterlibatan actor

1.7. Metodologi Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Seperti yang dijelaskan oleh John W. Creswell di dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design* “Data yang dikumpulkan adalah dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Sering kali pengumpulan data dalam studi fenomenologis dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan para partisipan (Creswell, 2009).” Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif tentang fenomena yang sedang terjadi.

Metode Analisis yang digunakan:

1. Analisis isi: Analisis isi digunakan untuk menganalisis teks, gambar, atau video.
2. Analisis Tematik: Digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data.
3. Analisis Naratif: Digunakan untuk menganalisis cerita atau pengalaman pada individu.

1.8.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek di dalam penelitian ini adalah individu maupun kelompok yang mengalami langsung fenomena yang terjadi sebagai informan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* (Sugiyono, 2018) yaitu teknik pemilihan informan yang diawali dengan informan yang berjumlah sedikit dimana para informan selanjutnya akan memberikan rekomendasi terhadap penulis terkait informan selanjutnya yang dapat diwawancari terkait fenomena yang sedang diteliti sehingga informasi yang didapatkan akan semakin bertambah banyak. Yang diawali dengan pemilihan Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Jepara dan terus berjalan sesuai arahan dari informan-informan berikutnya.

1.8.4. Jenis Data

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dari subjek penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan yang telah ditetapkan oleh peneliti, diantaranya adalah

Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Jepara dan Staff teknis yang menangani, serta perwakilan pengusaha mebel.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data-data yang diperoleh dari buku, *literature*, jurnal, dan artikel dari berbagai media.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah:

1. Observasi Partisipatif

Metode pengamatan dilakukan dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau aktivitas orang atau kelompok yang disurvei. Tuliskan pengamatan ini dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mengamati peneliti, peristiwa ini memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana subjek diamati untuk mengalaminya..

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara peneliti dengan yang subjek penelitian untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi. Penelitian kualitatif memiliki berbagai wawancara yang dapat digunakan berdasarkan struktur. Penelitian kualitatif melibatkan dua jenis wawancara. Artinya, (1) wawancara yang relatif tertutup di mana pertanyaan itu berfokus pada topik khusus dan umum dan

didukung oleh pedoman wawancara. (2) wawancara terbuka, Di mana para peneliti memberi diri mereka kebebasan dan berbicara secara luas dan secara rinci (Sudarwan, 2002).

1.8.7. Analisis Data

1) Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami sebagai kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data pengurangan data dilakukan terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif atau pengumpulan data. Pengurangan data adalah reformasi analitik yang mempertajam, mengklasifikasikan, memandu, membuang, dan mengatur data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi..

Adapun langkah-langkah Reduksi data, meliputi:

1. Pengodean: Memberikan kode pada data untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan.
2. Pengelompokan: mengelompoksn data berdasarkan kode atau kategori yang sama.
3. Pemilihan: Memilih data yang releant dan penting untuk di analisis.
4. Pengurangan: mengurangi data yang tidak releant atau penting

2) Triangulasi Data

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif (Nasution, 2003:115).